

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu negara tentunya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memerlukan tata Kelola yang baik agar memiliki tanggung jawab pengelolaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab yang baik, setiap pemerintah daerah harus memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya (Nengsy et al., 2018). Salah satunya adalah tanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan melaporkan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah menjadikan laporan keuangan sebagai media bagi seluruh entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap laporan keuangan yang diterbitkan (Triyani et al., 2018). Pertanggungjawaban tersebut terkait transparansi dan akuntabilitas dari segi laporan keuangan (Lesmana, 2021). Akan tetapi, sebelum laporan keuangan tersebut dipublikasikan maka laporan keuangan tersebut harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan untuk menilai tingkat kewajaran dari laporan keuangan yang dihasilkan. Dari opini audit yang

diberikan atas laporan keuangan tersebut, bisa dilihat gambaran kualitas laporan keuangan daerah (Hamen, 2021.)

Dalam pelaporan laporan keuangan tentunya terdapat peraturan pemerintah yang mendasari pelaporan tersebut. Hal tersebut ditunjukkan oleh tanggung jawab pengelola laporan keuangan yang Menyusun laporan keuangan secara baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku (Atharrizka et al., 2021). Oleh karena itu dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu penyusunan laporan keuangan tersebut (Askikarno et al., 2019). Dengan menerapkan teknologi informasi, informasi yang dihasilkan dapat diakses oleh semua pengguna dan dapat diakses secara realtime.

Pemerintah mewujudkan transparansi dalam pelaporan keuangan dengan cara mengikuti kaidah pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diterima secara umum serta memenuhi prinsip tepat waktu (Triyani et al., 2018). Salah satu organisasi pemerintah yang membuat/menyusun laporan keuangan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD merupakan perangkat daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan) yang menjalankan fungsi eksekutif dan harus berkoordinasi di masing masing daerah agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik (Nengsy et al., 2018). Maka dari itu, setiap OPD wajib menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan dengan baik. Laporan keuangan yang baik merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas (Chairina & Wehartaty, 2019)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu penilaian dari baik buruknya laporan keuangan dari satu periode yang dihasilkan (Triyani et al., 2018). Hasil penilaian audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTK), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Pemerintah wajib mengeluarkan laporan keuangan untuk evaluasi dan pengendalian kerja. Maka dari itu, pemerintah wajib membuat laporan yang baik dan benar agar pemakai laporan keuangan dapat memahami isi yang ada dalam laporan tersebut (Adji & Andayani, 2021). Jika laporan keuangan yang dihasilkan buruk dapat menimbulkan implikasi yang negatif salah satunya yaitu menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kualitas keputusan menjadi buruk (Reza Aditya, 2017). Laporan keuangan dikatakan relevan apabila dapat memberikan manfaat yang baik bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terdapat karakteristik laporan keuangan yang baik yaitu : relatif, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Oleh karena itu sistem informasi sebagai pengelola laporan keuangan harus memberikan laporan keuangan yang baik (Hayyuning Tyas, 2022).

Laporan pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya sistem informasi dan lemahnya pengendalian internal di dalamnya (Lesmana, 2021). Selain itu terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Daerah

daerah yang mengalami penurunan opini audit dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pemerintah Kota/ Kabupaten Mengalami Penurunan Opini**

<b>OPINI WDP MENJADI TMP</b>	
Pemkab Kepulauan Meranti	
<b>OPINI WTP MENJADI WDP</b>	
Pemkab Padang Lawas	Pemkab Pangandaran
Pemkot Binjai	Pemkot Bandung
Pemkab Kerinci	Pemkab Pematang
Pemkab Ogan Ilir	Pemkab Sumbawa
Pemkot Pagar Alam	Pemkab Kapuas
Pemkot Palembang	Pemkab Kolaka Timur
Pemkab Kaur	Pemkab Kepulauan Tanimbar
Pemkab Tanggamus	Pemprov Maluku Utara
Pemkab Bekasi	Pemprov Papua

Sumber : IHPS BPK Republik Indonesia Semester I TA 2023

Permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2023 antara lain berkaitan dengan aset lancar, aset tetap, aset lainnya, belanja operasi dan belanja modal. Pada kasus yang dibahas yaitu pada pemerintahan kabupaten Boyolali, Klaten, Surakarta, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Menurut laporan opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2021, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan yang dibuat. Hal ini membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dari laporan keuangan dapat dibuktikan dengan opini audit yang wajar

Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak lepas dari peran Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) selalu berkaitan dengan laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem Pengendalian

Internal diciptakan guna memberikan kepercayaan atas laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Pratiwi et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan Sistem Pengendalian Internal yang akurat.

Baik buruknya laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh baik buruknya Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dilaksanakan dalam pemerintahan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 definisi Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya definisi pengendalian internal menurut Romney dan Steinbeart (2015:226) dalam (Reza Aditya & Surjono, 2017) mengenai pengendalian internal adalah sebagai berikut : Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang diperuntukkan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang handal dan akurat, mendorong kesesuaian dengan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut COSO 2004, COSO ERM pengendalian internal terdiri dari delapan komponen yaitu 1) Lingkungan Internal, 2) Penetapan Tujuan, 3) Identifikasi Kejadian, 4) Penilaian Risiko, 5) Respon Terhadap Risiko, 6) Aktivitas Pengendalian, 7) Informasi dan Komunikasi, 8) (Triyani et al., 2018a). Agar sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan baik,

diperlukan penerapan dari kedelapan komponen tersebut sehingga akan mendorong terlaksananya pengendalian internal yang memadai. Sebagaimana telah diketahui, bahwa kesuksesan sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Struktur pengendalian internal yang memadai dapat mengurangi kesalahan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan memadai (Hamen, 2021.).

Berdasarkan penelitian Hendra Lesmana (2021), Putri Andiani et al (2019), dan Zelda Triyani et al (2018). Menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Brendhi (2018), menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Suksesnya Pembuatan Laporan Keuangan juga tidak terlepas dari peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang berada di dalamnya. Salah satu perangkat yang dapat menghasilkan laporan keuangan adalah sistem akuntansi yang memadai. Dengan adanya sistem akuntansi yang memadai, membuat akuntan perusahaan dapat menghasilkan informasi keuangan bagi setiap manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan (Hayyuning Tyas, 2021)

Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan suatu organisasi. Menurut Rommey (1997) sistem

informasi merupakan sebuah sistem yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data dan terorganisir cara untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi dengan cara dan juga prosedur tertentu (Nengsy et al., 2018). Sistem Informasi Akuntansi yang akurat, terstruktur dan komprehensif dapat membantu Perusahaan terkait data data penting Perusahaan. Jika sistem informasi akuntansi tidak baik, maka informasi akuntansi yang dibuat menjadi tidak akurat dan akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan itu sendiri (Hayyuning Tyas, 2021).

Dalam pemerintahan, sangat diperlukan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang akurat apabila dalam pengelolaannya memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Penyusunan sistem akuntansi pemerintahan harus mengacu pada SAP berbasis akrual dan penerapan statistik keuangan pemerintah untuk Menyusun konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Roni Maulinda (2021), Zelda Triyani (2018) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nishrina Atharrizka et al (2021) menyatakan

bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. *Good Corporate Governance* berfungsi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam proses pelaporan laporan keuangan. *Good Governance* mengacu pada serangkaian proses, prinsip, dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan dikendalikan (Maharani Zeloventa et al., 2023). *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG, 2012) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai struktur sistem dan proses yang digunakan oleh organisasi sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka Panjang. *Good Corporate Governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha suatu perseroan untuk memberikan nilai tambah sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar agar terciptanya suatu pola atau lingkungan kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional (Gea & Putra, 2022). *Good Corporate Governance* memiliki beberapa prinsip salah satunya yaitu prinsip transparency. Dengan prinsip transparency selain harus akurat dan benar perusahaan juga harus melaporkan informasi laporan keuangan secara tepat waktu (Irham Maulana, 2019).

*Good Governance* muncul di Indonesia setelah era reformasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan yang muncul. Tuntutan

pemerintah orde baru yaitu presiden sebagai pusat kekuasaan. Sebagai akibat dari konstitusi maupun akibat dari Lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik (Maulana, 2021). Pada saat ini Good Corporate Governance sudah banyak diterapkan pada perusahaan-perusahaan dan instansi pemerintahan. Namun, masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dari kurang maksimalnya implementasi Good Corporate (Dewi Kuraesin & Yadiati, 2021). Pemerintah yang bersih merupakan syarat dalam tata Kelola pemerintahan yang baik, salah satu angka indikasinya adalah korupsi (Rahmat Putra & Otarman Gea, 2022). Salah satu masalah yang banyak terjadi adalah gratifikasi/penyuapan. Menurut laporan KPK terdapat 85 kasus korupsi dari bulan januari sampai oktober 2023. Kasus yang paling banyak adalah gratifikasi dengan 44 kasus selama periode waktu tersebut. Selain korupsi, tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan Good Corporate untuk memperbaiki dan meningkatkan tata Kelola dalam instansi pemerintah menjadi masalah (Fitria Andalus, et al 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh syabina Maharani et al, (2023), Maulana, (2021) Dewi Kuraesin & Yadiati, (2021) yang meneliti tentang pengaruh Corporate Governance terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia menyimpulkan bahwa corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Adanya inkonsistensi dari masing masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka peneliti ingin menggali lebih dalam lagi terkait

pengaruh sistem pengendalian internal, Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Sistem Pengendalian Internal secara signifikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) secara signifikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Apakah *Good Governance* secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- d. Apakah Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi dan *Good Governance* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris terkait hal hal dibawah ini:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Sistem pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### D. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi.

##### b. Manfaat Praktik.

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat
- 2) Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal
- 3) Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian penelitian selanjutnya

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memahami pokok bahasan yang diuraikan

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi kajian kajian teori yang relevan dengan penelitian dan berisi penjelasan

penjelasan terkait variabel independen dan variabel dependen

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dibahas metode penelitian yang dipakai, jenis data, sampel dan populasi penelitian, Teknik pengolahan data

### **BAB IV**

#### **HASIL dan PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dibahas hasil dari pengolahan data data yang didapatkan sehingga dapat dilihat pengaruh pengaruh dari masing masing variabel yang ada

### **BAB V**

#### **KESIMPULAN**

Dalam bab ini dijabarkan kesimpulan dari hasil olah data yang sudah dilakukan pada masing masing variabel.